

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak eksternalitas pada terminal bus lempake kota Samarinda

Juliansyah Roy^{1✉}, Hairun Nisa Maulida Putri², Inka Mayrani³, Nurul Izsati⁴, Riska Marsa Linda⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah terhadap eksternalitas Terminal Bus Lempake. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada Koordinator terminal, Tenaga Pengadministrasian dan Kearsipan, pelaku UMKM sekitar terminal dan juga responden yang merupakan pengunjung Terminal Bus Lempake. Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2019 dan literatur lainnya berupa dokumen jurnal maupun artikel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/menjelaskan dan menganalisis keadaan yang bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai studi tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Eksternalitas Pada Terminal Bus Lempake di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Samarinda masih belum optimal dalam menangani dampak eksternalitas pada Terminal Bus Lempake. Terlihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah terutama pada penyaluran dana yang belum tepat sasaran.

Kata kunci: Eksternalitas; kebijakan; RKPD

Government policy in overcoming the impact of externalities on the lempake bus terminal in Samarinda city

Abstract

This study aims to find out and analyze what policies have been given by the government towards the externalities of the Lempake Bus Station. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is obtained from the results of interviews directly to the terminal coordinator, Administration and Archival Personnel, MSME actors around the terminal and also respondents who are visitors to Lempake Bus Station. Secondary data was obtained from several agencies related to this research, namely the Samarinda City RKPD 2019 and other literature in the form of journal documents and articles. The method used in this study is qualitative research to describe/explain and analyze the state based on facts in obtaining a complete picture of the study of Government Policy in Overcoming the Impact of Externalities on Lempake Bus Station in Samarinda City. The results showed that the Samarinda City government was still not optimal in dealing with the impact of externalities on the Lempake Bus Station. It can be seen from the results of interviews that have been conducted by researchers that there are several government policies, especially on the distribution of funds that have not been on target.

Key word: Externalities; policies; RKPD; bus station

PENDAHULUAN

Terminal sebagai industri jasa, pada hakekatnya adalah jasa dalam bentuk pelayanan yang diberikan oleh perusahaan terminal kepada pelanggannya, harus memiliki mutu atau kualitas fasilitas yang baik. Oleh karena itu perusahaan jasa sudah seharusnya mampu mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Transportasi darat sangat penting artinya bagi kehidupan dalam kegiatan manusia. Pengembangan Kota Samarinda yang telah menjadi pusat kegiatan heterogen dan untuk menunjang kelancaran aktivitas masyarakat

Kota Samarinda memerlukan fasilitas umum yang memadai dan mampu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat kota. Terminal bus menjadi salah satu bagian penting bagi kelancaran penggunaan kendaraan umum jalur darat. Selain merupakan tempat pemberhentian dan pemberangkatan kendaraan bus, terminal bus juga memegang peranan untuk mengatur arah sirkulasi dan hirarki jalan. Disamping itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan dinilai kurang partisipatif dalam melihat masalah ini.

METODE

Barang publik merupakan ruang lingkup dalam penelitian ini khususnya mengenai dampak eksternalitas penggunaan transportasi umum di wilayah Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak eksternalitas pada Terminal Bus Lempake di Kota Samarinda.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada Koordinator terminal, Tenaga Pengadministrasian dan Kearsipan, pelaku UMKM sekitar terminal dan juga responden yang merupakan pengunjung Terminal Bus Lempake. Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2019 dan literatur lainnya berupa dokumen jurnal maupun artikel.

Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai studi tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Eksternalitas Pada Terminal Bus Lempake di Kota Samarinda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-undang Lalu Lintas N0.14 Tahun 1992, terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. Menurut Suwardjoko P.Warpani (2002:74) terminal adalah simpul jaringan pengangkutan dengan berbagai fungsi. Fungsi inilah yang menyebabkan timbulnya kegiatan perdagangan yang memanfaatkan akses dan fungsi terminal.

Pengelolaan infrasturukur terminal bus dilakukan untuk menjaga pemanfaatan terminal serta fasilitas penumpang sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan infrastruktur dapat dinilai dari pemeliharaan/perawatan sarana-prasarana terminal, pemenuhan akan sarana penumpang dan penunjang terminal perlu di koordinasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan sarana/prasarana terminal. Pengelolaan Infrastruktur Terminal Bus Lempake sudah berjalan tetapi belum optimal hal ini dapat dilihat dari perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana terminal, pemenuhan fasilitas terminal yang kurang baik dan koordinasi dengan instansi yang tidak berjalan dengan optimal.

Hasil Wawancara

Kami telah melakukan observasi pada Terminal Bus Lempake dengan mengadakan kegiatan wawancara terhadap pihak pengelola dan pengunjung. Hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil Wawancara Pihak Pengelola



Gambar 1.

Wawancara pihak pengelola

Dari wawancara yang telah kami lakukan kepada pihak pengelola yaitu Bapak Jafaruddin HA S.E selaku koordinator kepala terminal mengatakan bahwa dari fasilitas yang disediakan di Terminal Bus Lempake sudah cukup baik. Terlihat dari tersedianya wc umum, parkir, dan kios-kios yang berjualan untuk memudahkan penumpang mencari makanan. Tingkat pelayanan yang diberikan juga sudah baik. Untuk tingkat kejahatan yang terjadi di Terminal Bus Lempake menurut pihak pengelola tidak pernah terjadi selama masa jabatan Bapak Jafaruddin HA S.E.

Hasil Wawancara Pihak Penumpang



Gambar 2.

Wawancara Pihak Penumpang

Dari wawancara yang telah kami lakukan kepada pihak penumpang, yaitu Pak Fauzan ia mengatakan bahwa untuk tarif harga tiket yang diberikan cukup mahal dibandingkan dengan harga tiket Terminal lainnya. Padahal untuk fasilitas yang diberikan lebih lengkap Terminal lain daripada Terminal Bus Lempake. Kemudian untuk jam keberangkatan kadang tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sehingga membuat para penumpang menjadi lebih lama menunggu. Selanjutnya adalah kebersihan yang ada di lingkungan Terminal Bus Lempake baik di sekitar lingkungan maupun di dalam bus bersih dan cukup nyaman. Dan yang terakhir adalah dari keamanannya menurut Pak Fauzan, bus di Terminal Bus Lempake tidak memiliki sabuk pengaman di setiap tempat duduknya padahal itulah hal

yang paling penting untuk keselamatan para penumpang, lalu kursi untuk penumpang di dalam bus dirasa kurang nyaman.

Dampak Eksternalitas pada Terminal Bus Lempake

Pada Terminal Bus Lempake ternyata masih banyak permasalahan umum yang menjadi persoalan yang serius dimata masyarakat akan tetapi pemerintah kurang menanggapi masalah tersebut, beberapa dampak eksternalitas diuraikan sebagai berikut:

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Terminal Bus Lempake

Pengelolaan sarana dan prasarana adalah serangkaian fasilitas sebagai penunjang pembangunan pada terminal. Pengelolaan sarana dan prasarana bisa dilihat dari perawatan terminal. Untuk di Terminal Bus Lempake sendiri pengelolaan sarana dan prasarananya sudah berjalan tetapi belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari pemenuhan fasilitas terminal yang kurang baik seperti tidak adanya tempat duduk untuk para penumpang yang sedang menunggu kedatangan bus di lingkungan terminal.

Pengelolaan Jadwal Pemberangkatan

Permasalahan yang kerap terjadi pada pengelolaan jadwal keberangkatan di Terminal Bus Lempake adalah bus yang baru bisa berjalan jika telah mendapatkan penumpang minimal 15 orang atau setara dengan kembalinya modal. Sehingga membuat penumpang yang sudah mempunyai antrian harus menunggu lagi penumpang di luar jadwal keberangkatan. Tentunya hal ini akan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada penumpang.

Menimbulkan Masalah Lalu Lintas

Di sisi lain terminal bus Lempake ini juga mengakibatkan eksternalitas negatif pada masalah lalu lintas yaitu berupa kemacetan antara bus dengan kendaraan lainnya, kebisingan dimana membuat warga yang tinggal di sekitar terminal terganggu, dan polusi udara karena muncul dari asap bus yang berlebihan.

Maraknya Pedagang Kaki Lima Di Terminal Bus Lempake

Kurangnya peraturan yang diterapkan oleh pengelola Terminal Bus Lempake terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di dalam terminal. Karena hal ini sangat merugikan bagi pelaku UMKM di sekitar terminal yang sudah menyewa lahan untuk berjualan.

Penghubung Akses Antar Kota

Dibalik permasalahan yang kerap terjadi di Terminal Bus Lempake masih ada beberapa dampak positif yaitu kemudahan masyarakat dalam menempuh akses perjalanan yang jauh. Apalagi saat ini masih ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

Menciptakan Nilai Tanah Disekitar Lingkungan Terminal Bus Lempake

Nilai tanah adalah suatu pengukuran yang didasarkan kepada kemampuan tanah secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktifitas dan strategi ekonomisnya. Sehingga nilai tanah yang ada disekitar Terminal Bus Lempake memberikan nilai jual yang tinggi.

RKPD Kota Samarinda Tahun 2019 (Kebijakan Yang Diberikan Untuk Terminal Bus Lempake)

Dalam melakukan kegiatannya pengelolaan Terminal memerlukan arahan dari pemangku kebijakan dan arahan pemerintah terkait permasalahan penyediaan dana anggaran infrastruktur dan layanan terminal. Kebijakan pemerintah ini tercantum di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2019. Dimana dalam RKPD tersebut menjelaskan bahwa terdapat rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya.

Tabel 1.
Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2019

Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Pelaksanaan		Sumber Dana
		Target Kinerja	Dana Pelaksana	
Rehabilitasi terminal dalam kota	Terpeliharanya terminal dalam kota	1	1.000.000.000	APBD Kota
Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Terciptanya peningkatan pelayanan angkutan di terminal	5	150.000.000	APBD Kota

Dari Tabel 1, menunjukkan bahwa terdapat program pemerintah mulai dari rehabilitasi dan penciptaan keamanan dan kenyamanan pada terminal yang ada di Samarinda. Dimana pemerintah sudah memberikan estimasi dana pelaksana agar program kegiatan bisa tercapai. Akan tetapi dana anggaran yang telah kami observasi belum sepenuhnya di terapkan pada pembangunan pengelolaan fasilitas yang ada di Terminal Bus Lempake. Hal tersebut dikarenakan tertundanya dana pelaksana yang diakibatkan melonjaknya kasus Covid-19 dari tahun 2020-2021.

Pada tahun 2019 Terminal Bus Lempake mengalami musibah bencana tanah longsor sehingga beberapa fasilitas yang ada di terminal tersebut mengalami kerusakan. Namun karena melonjaknya kasus Covid-19 dari tahun 2020-2021, membuat dana yang seharusnya disalurkan untuk perbaikan terminal harus disalurkan untuk kepentingan kasus Covid-19. Di tahun 2022 barulah dana untuk perbaikan Terminal Bus Lempake mulai disalurkan. Artinya disini kebijakan pemerintah Kota Samarinda sebagian sudah terlaksana dalam memperhatikan keamanan dan kenyamanan Terminal Bus Lempake walaupun belum sepenuhnya optimal tersalurkan.

Kebijakan Pemerintah Sebagai Penyediaan Fasilitas Pada Terminal Bus Lempake

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Peran pemerintah sangatlah penting dalam berlangsungnya kegiatan masyarakat apalagi pemerintah sebagai penyedia fasilitas perannya sangat dibutuhkan.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk dalam memberikan fasilitas umum dengan memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Penyediaan fasilitas dalam pengelolaan terminal misalnya, pemerintah dalam hal ini berusaha memberikan pelayanan untuk kepentingan umum (public) dengan memberikan fasilitasi dalam pengelolaan terminal, pemerintah memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan yang dimiliki oleh terminal tersebut.

Untuk Terminal Bus Lempake sendiri kebijakan pemerintah Kota Samarinda dalam penyediaan fasilitas sudah cukup baik. Menurut kami hanya ada satu masalah yang belum terlaksanakan yaitu tidak adanya tempat duduk untuk para penumpang yang sedang menunggu kedatangan bus di lingkungan terminal. Padahal dengan adanya tempat duduk dilingkungan terminal akan membuat penumpang nyaman menunggu kedatangan bus.

Peran Pemerintah Sebagai Penyedia Anggaran

Pemberian bantuan pendampingan, juga diperlukan fasilitasi dalam bidang pendanaan maupun permodalan. Peran pemerintah dalam hal ini adalah membantu mencari jalan keluar untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan. Anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan dalam hal ini daerah selama satu tahun tentang pengeluaran dan sumber penerimaan/pendapatannya. Secara konseptual, anggaran berarti dokumen perencanaan yang memuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam bidang keuangan.

Sebagai penyedia anggaran pemerintah Kota Samarinda masih belum optimal dalam menyalurkan dananya untuk Terminal Bus Lempake. Terlihat pada RKPD Kota Samarinda tahun 2019 yang tidak sesuai dengan hasil dari fasilitas yang ada di Terminal Bus Lempake. Tetapi untuk masalah tanah longsor yang terjadi di terminal, di tahun 2022 ini sudah mulai dilakukan perbaikan oleh pemerintah.

Peran Pemerintah Dalam Mengupayakan Efisiensi dan Peningkatan Layanan (Jam Keberangkatan)

Dari keterangan pak Jafaruddin pemerintah Kota Samarinda telah bernegosiasi kepada pihak penyedia jasa transportasi untuk mengatur jam keberangkatannya. Pihak Dinas Perhubungan yang tidak mampu untuk mengatur membatasi tugas pemerintah tanpa adanya perencanaan yang tepat. Meskipun demikian pengawasan yang kurang membiarkan Terminal Bus Lempake bekerja sesuai kemauannya.

Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Terminal Penumpang

Pengembangan terminal harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan terminal ke dalam suatu program pembangunan ekonomi daerah. Di

samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengelolaan terminal.

SIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan maka yang menyediakan barang publik hendaknya memperhatikan hal-hal seperti:

Penyediaan barang publik hendaknya disediakan atas permintaan publik yang berguna untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dari permasalahan yang terjadi di Terminal Bus Lempake;

Perlunya pengawasan anggaran yang telah disalurkan untuk Terminal Bus Lempake agar seluruh anggaran dapat tepat sasaran; dan

Upaya untuk mengatasi dampak buruk dari eksternalitas pemerintah daerah hendaknya tidak hanya bertumpu pada aturan pokok tetapi juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Nugraha, Bramantya. 2017. "Studi Tentang Keberadaan “Terminal Bayangan” Sukun Banyumanik Kota Semarang”: Universitas Diponegoro Semarang. Jurnal penelitian.

"Cegah Longsor, Area Terminal Bus Lempake Samarinda Diturap." Tribunkaltim.co, 1 Oct. 2022, kaltim.tribunnews.com/2022/10/01/cegah-longsor-area-terminal-lempake-samarinda-diturap.

Haris, M. Sahpa, Diana. 2019. "Eksternalitas Negatif Penggunaan Transportasi Pribadi Di Kota Banda Aceh." Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol 4.

"Kebijakan Dan Bantuan Pemerintah Di Bidang Transportasi Oleh." SlideToDoc.com - One of the Largest Repository of Presentations, slidetodoc.com/kebijakan-dan-bantuan-pemerintah-di-bidang-transportasi-oleh/.

Noviyanto R. 2005. "RPJMD Perencanaan Kota Samarinda." Portal Resmi Kota Samarinda, samarindakota.go.id/perencanaan/rpjmd.

Oktaviana, Yasmi. 2017. "Studi Tentang Pengelolaan Terminal Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Kota Balikpapan." Ejournal Ilmu Pemerintahan. Vol 5 Nomor 1, 2017.